

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan: Proses Penguatan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Sesaot, NTB

Yumantoko ^{1*} 

¹ Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas. Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta. Indonesia

* **Korespondensi:** yumant@gmail.com; Telepon: +6281804054433

Diterima: 1 November 2022; Disetujui: 28 November 2022; Diterbitkan: 29 Desember 2022

Abstrak: Program pemberdayaan masyarakat skema perhutanan sosial (PS) sudah lama berjalan. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kehutanan yang mengancam sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan. Namun program tersebut berjalan lambat dari target 12,7 juta hektar (dari 2014 hingga 2024), pada 2021 baru tercapai 4,5 juta hektar. Hal ini tidak lepas dari program itu sendiri kurang mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses PS dengan melihat dari kacamata pemberdayaan itu sendiri. Studi membahas dari sisi informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan lembaga lokal. Penelitian ini mengambil kasus PS di kawasan Sesaot, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mewawancarai informan penting secara purposive. Hasilnya menunjukkan bahwa fasilitator dan petani masih kurang memahami informasi PS. Partisipasi masyarakat belum terlihat karena campur tangan fasilitator masih besar. Akuntabilitas dalam program pemberdayaan dilakukan dengan melaporkan hasil kegiatan untuk pihak-pihak tertentu. Kapasitas organisasi lokal perlu ditingkatkan agar petani menjadi berdaya. Terjadi penambahan aset dan kemampuan individu dalam mengembangkan usaha kehutanan, namun tidak semua masyarakat mendapat kesempatan yang sama.

Kata kunci: perhutanan sosial, pemberdayaan, masyarakat, kehutanan

Abstract: The Social Forestry Program has been running for a long time. This program aims to solve forestry problems threatening socio-economic and environmental aspects. However, the program is running slowly. From the planned implementation of 12.7 million hectares (from 2014 until 2024), only 4.5 million hectares have been reached in 2021. This achievement is because the program needs to accommodate the local community's needs. This study aims to analyze the Social Forestry process from the empowerment perspective. The discussion relates to information, participation, accountability, and local institutions from the empowerment process. The research location is in the Sesaot area, West Nusa Tenggara Province. The research method uses a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with a purposive. The results show that the facilitators and farmers still do not understand the social forestry information. The role of the facilitator is still dominant, and community participation needs to be increased. Accountability in the empowerment program is shown by reporting the results of activities for certain parties. The capacity of local organizations needs to be improved so that farmers become empowered. There is an increase in individual assets and abilities in the forestry business, but not all communities have the same opportunities.

Keywords: social forestry, empowerment, society, forestry

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki luas daratan 187 juta hektar dimana 125 juta hektar-nya merupakan kawasan hutan (MoEF, 2021). Dari luas hutan tersebut pemerintah menetapkan fungsi kawasan konservasi, lindung, dan produksi. Pemerintah membatasi masyarakat sekitar mengakses sumberdaya dan hal ini mengakibatkan tekanan pada hutan terus meningkat (Djamhuri, 2008). Pemerintah mengklaim pada tahun 2019 hingga 2020 kasus deforestasi di Indonesia berada di titik terendah dari tahun-tahun sebelumnya yakni hanya tinggal 115,5 ribu hektar (MoEF, 2021), walaupun demikian hal ini masih tergolong besar. Permasalahan kehutanan seperti deforestasi berdampak pada kemiskinan, konflik, hal ini mengancam keberlangsungan kehidupan lingkungan dan masyarakat disekitarnya (de Jong, 2012).

Permasalahan kehutanan di Indonesia diatasi salah satunya dengan program Perhutanan Sosial (PS) (MoEF, 2016). Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021). PS dilatarbelakangi karena semakin terpinggirkannya masyarakat rentan akibat industrialisasi yang merusak lingkungan secara luas (Moeliono et al., 2017). Tujuan PS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021). PS terdiri dari beberapa program seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021). PS memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil dengan memberdayakan masyarakat setempat dengan mengembangkan kapasitas dan pemberian akses untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas lingkungan (PP No. 6 Tahun 2007). Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat lokal, mendukung mata pencaharian, dan konservasi (Fisher et al., 2018). PS sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (MoEF, 2016). Program tersebut merupakan wadah yang tepat bagi penduduk lokal untuk mendapat pembagian hak pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan (Fisher et al., 2019). Pemberian wewenang pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal sebagai bentuk tata kelola kehutanan lebih efisien, fleksibel, adil, akuntabel, dan partisipatif (Andersson et al., 2004).

Namun, PS yang selama ini sudah berjalan masih menyimpan tantangan dan permasalahan. Menurut Rakatama & Pandit (2020) tantangan tersebut yaitu *pertama* kelembagaan pengelolaannya cenderung birokratis dan berbiaya tinggi sehingga tidak efektif dalam menjalankan PS. *Kedua* dari sisi kebijakan tidak mencerminkan kepentingan masyarakat lokal, kebijakan tumpang tindih dengan kebijakan lain dan tidak memperhatikan pengakuan dan partisipasi masyarakat. *Ketiga* munculnya konflik karena ketidakseimbangan dalam pembagian sumber daya di tingkat lokal. Pengelolaan PS cenderung bersifat formal yang berbeda dengan sistem pengelolaan yang sudah ada (Erbaugh, 2019). Selain itu PS birokratis kurang menunjukkan hasil karena pembagian manfaatnya untuk masyarakat lokal tidak terlihat secara merata (Fisher et al., 2019). Saat ini implementasi PS masih lemah dalam : kebijakan, dukungan kelembagaan, basis pengetahuan, dan transfer keterampilan (Galudra, 2019). Target PS seluas 12,7 juta hektar sampai 2021, namun implementasinya hingga 2021 baru tercapai 4,8 juta hektar (MoEF, 2021). Kontras dengan program PS yang memiliki makna penting bagi masyarakat sekitar hutan dalam memberi kepastian pengelolaan lahan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Salah satu provinsi yang sudah menjalankan program perhutanan sosial yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB memiliki kawasan hutan seluas 1.071.722,83 hektar dimana 319.000 hektar dicadangkan untuk PS, namun realisasinya baru 70.357,77 Ha (DLHK NTB, 2021). Perhutanan sosial sudah dilaksanakan di seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh NTB. Seperti KPH Rinjani Barat, KPH Rinjani Timur, KPH Pelangan Tastura, dan lain sebagainya. Ini artinya masih banyak yang mesti disiapkan untuk program tersebut agar realisasinya bagus.

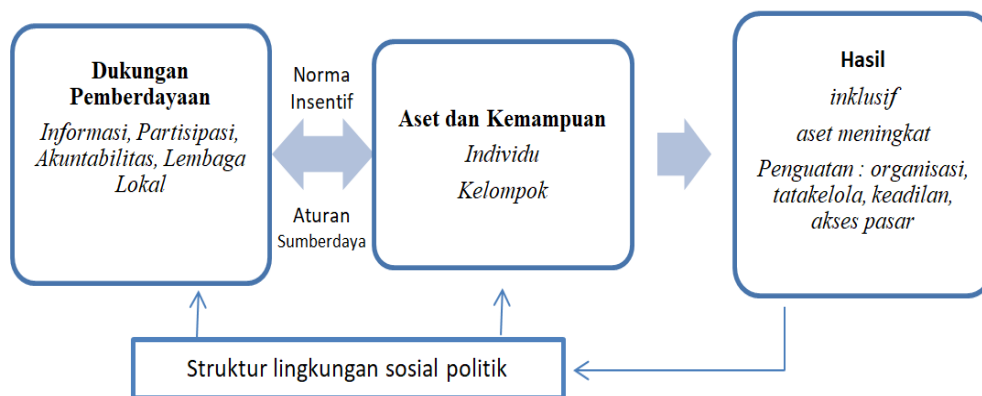
Melihat latar belakang dan untuk mengisi kekosongan mengapa pemberdayaan melalui PS kurang menunjukkan perkembangan yang baik meskipun dalam praktiknya telah berlangsung lama

Yumantoko

maka perlu untuk dilakukan penelitian ini. Studi ini melihat program pemberdayaan masyarakat khususnya PS dari sisi proses pemberdayaan itu sendiri. Hal ini penting karena pemberdayaan dapat mempercepat efektivitas program pembangunan dan berdampak pada pengentasan kemiskinan (Narayan, 2002). Proses PS sangat menarik untuk dikaji sebagai bagian dari program pemberdayaan dan dapat dijadikan bahan pembelajaran agar PS berkontribusi dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Salah satu teori terkait pemberdayaan masyarakat yaitu dari Narayan (2002). Tulisan ini menggunakan teori tersebut karena mampu menjelaskan proses perpaduan antara dukungan pemberdayaan (informasi, akuntabilitas, partisipasi, dan kapasitas organisasi lokal) dengan aset dan kemampuan individu/kelompok dalam lingkungan sosial politik tertentu untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam pemberdayaan diperlukan aset dan kemampuan individu/kelompok. Disisi lain untuk menghasilkan aset dan kemampuan individu/kelompok diperlukan insentif, aturan, sumberdaya, dan norma yang sesuai agar dukungan pemberdayaan dapat meningkat kualitasnya. Untuk lebih memahami dalam teori tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagan Proses Pemberdayaan



Sumber : Narayan (2002)

Dukungan dalam pemberdayaan sesuai Gambar 1 yaitu :

- *Informasi*. Kemudahan mendapat informasi menguntungkan masyarakat kecil dalam akses kebutuhan dasar informasi yang diperlukan seperti program pemerintah, akses pasar, layanan keuangan dan sebagainya. Penyebaran informasi melalui dua arah fasilitator ke petani dan petani ke fasilitator yang mencakup diskusi kelompok, puisi, dongeng, debat, teater jalanan, informasi tertulis, dan sebagainya.
- *Inklusi/partisipasi*. Yaitu akses masyarakat marjinal kepada sumberdaya yang dapat digunakan dalam merubah keadaan. Kebutuhan satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lain. Pada masyarakat sekitar hutan, akses pada sumber-sumber tanaman yang menghasilkan penghasilan merupakan kebutuhan pokok ketimbang fasilitas lainnya. Penduduk lokal merupakan aktor utama, sedangkan pihak lain membantu dalam melecutkan kemampuan masyarakat itu sendiri.
- *Akuntabilitas*. Pejabat negara, pegawai negeri, swasta, pengusaha, dan praktisi kebijakan lainnya akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Akuntabilitas dalam pemberdayaan dimaksudkan agar pihak-pihak yang terkait dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan terutama sumber daya yang selama ini digunakan.
- *Kapasitas lembaga lokal*. Kelompok dan komunitas terorganisir agar dapat mengatur diri mereka sendiri. Kapasitas organisasi lokal mengacu pada kemampuan bekerja bersama, mengatur diri mereka sendiri, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah bersama. Untuk itu, kelembagaan lokal harus dibentuk untuk mampu menggali potensi yang dapat dikembangkan sesuai tujuan bersama.

Pemberdayaan dalam bidang kehutanan diatur dalam sejumlah aturan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 mengatur pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pada Pasal 83 disebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, yang dilakukan dengan cara pengembangan kapasitas dan pemberian akses masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Bentuknya disebutkan dalam Pasal 84 yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kemitraan Kehutanan. Selanjutnya hal ini yang disebut sebagai Perhutanan Sosial (PS). Pada awalnya PS disusun dalam peraturan yang berbeda-beda seperti *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa*, *Peraturan Menteri Kehutanan No 39 Tahun 2013 Tentang Program Kemitraan Kehutanan*, dan *Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm)*. Namun pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 83 Tahun 2016, PS disusun dalam satu peraturan di dalamnya mencakup Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Adat. Kemudian pada tahun 2021 keluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dimana dalam aturan tersebut terdapat perbedaan dari peraturan sebelumnya antara lain, lebih rinci, dan lebih melibatkan banyak pihak.

Masyarakat sekitar hutan banyak menggantungkan hidup dari sumber daya alam sekitar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keterlibatan masyarakat dengan mengolah sumber daya terutama hayati mulai dari memungut langsung hingga memanen. Namun, pembangunan dan industrialisasi yang berkembang selama ini banyak merugikan masyarakat rentan karena biasanya diikuti oleh kerusakan lingkungan. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah dengan memberi penguatan kepada masyarakat rentan seperti dengan cara pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

2. Metode

1.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021. Pengumpulan data lapangan dilakukan selama tiga bulan yaitu Oktober, November, dan Desember 2020. Lokasi penelitian berada di kawasan hutan Sesaot, dimana disekitar kawasan ini terdapat PS jenis HKm. Secara geografis kawasan Sesaot yang luasnya 5.950,18 hektar terletak diantara 8° 15' - 8° 35' Lintang Selatan dan 116° 03' - 116° 44' Bujur Timur, dan ketinggian 300 – 600 meter dari permukaan laut. Kawasan ini merupakan penyangga air Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Mata air yang berasal dari kawasan ini mengalir ke Kali Jangkak, Kali Sesaot, Kali Timbesar, dan Kali Bensua. Sungai tersebut berguna untuk pertanian, pariwisata, perikanan, dan kebutuhan domestik rumah tangga di Lombok Barat dan Kota Mataram (KPH Rinjani Barat, 2019).

Kawasan hutan ini berada di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Ada lima desa yang berbatasan langsung yaitu Sedau, Lebah Sempaga, Sesaot, Pakuan, dan Buwun Sejati. Satu desa berada di wilayah Kecamatan Lingsar yaitu Batu Mekar. Masyarakat memanfaatkan hutan untuk tanaman tumpang sari atau tanaman semusim. Tanaman tumpang sari sangat penting dalam pemenuhan hidup masyarakat setempat karena mampu menghasilkan produk pangan untuk kebutuhan jangka pendek atau harian. Warga juga mengusahakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang.

1.2. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Selain itu untuk mendapatkan narasi dan menggali informasi bermanfaat dari program pemberdayaan tersebut. Data primer diperoleh lewat wawancara yang dilakukan dalam model tidak terstruktur. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive*. Pencarian informan didasarkan pada tujuan agar dapat memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian terkait PS. Penelitian mengambil informan yang berasal dari semua kalangan yang terlibat dalam PS di kawasan Sesaot seperti ketua kelompok tani sebanyak satu orang, petani satu orang,

Yumantoko

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dua orang, penyuluh satu orang, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) satu orang. Data yang dikumpulkan berupa informasi dalam pemberdayaan, akuntabilitas, partisipasi, lembaga lokal, dan dampak PS terhadap warga lokal. Informan merupakan tokoh kunci di komunitasnya yang dianggap paling mengetahui PS di kawasan Sesaot.

Peneliti menggunakan panduan kuesioner yang pertanyaannya terbuka sehingga informan bebas menjawab. Dalam penelitian lapangan, peneliti menanyakan pertanyaan terkait partisipasi masyarakat, informasi dalam proses sosialisasi, organisasi lokal, akuntabilitas, dan juga manfaat yang dirasakan dalam mengikuti program. Peneliti merahasiakan informasi yang diperoleh dan semata untuk penelitian misalnya peneliti hanya menuliskan inisial informan dalam laporan. Data sekunder diperoleh antara lain dari laporan dan catatan dari lembaga yang diperoleh lewat lembaga langsung maupun lewat internet.

1.3. Analisis Data

Analisis dilakukan selama proses penelitian. Karena pada dasarnya dalam penelitian kualitatif analisis dapat dilakukan ketika penelitian berlangsung (Creswell, 2018). Sasaran utama analisis adalah untuk mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan apa yang telah terjadi dalam satu konteks terbatas (Miles et al., 2014). Tujuannya untuk menghubungkan data dengan konsep-konsep penting yang menarik (Yin, 2018). Analisis antara lain berisi kegiatan menyusun dan mempersiapkan data untuk analisis, membaca seluruh data, memberi kode data sesuai tema dan mendeskripsikan, saling menghubungkan tema dan deskripsi, selanjutnya yaitu menginterpretasi makna (Creswell & Creswell, 2018). Peneliti membagi analisis berdasar dua tujuan: *pertama* untuk melihat proses pemberdayaan di Hutan Kemasyarakatan Sesaot dari teori Narayan (2002) yaitu mencakup informasi, partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal. *Kedua* untuk melihat hasil dalam pemberdayaan. Kesimpulan dilakukan terhadap keseluruhan analisis tentang makna apa yang bisa dipelajari dari hasil peneliti. Dalam pembahasan studi ini secara garis besar membahas tentang proses pemberdayaan dan dipadukan dengan pendapat ilmuwan terkait sosialisasi, partisipasi, akuntabilitas, dan kelembagaan.

3. Hasil Penelitian

1.4. Proses Pemberdayaan di Kawasan Sesaot

1.4.1. Akses Informasi (Sosialisasi Program)

Petani memperoleh informasi PS lewat lembaga fasilitator ketika sosialisasi. Selain itu pada saat sosialisasi petani menyampaikan aspirasi tentang apa yang akan diharapkan dari program. Salah satu contoh sosialisasi yang dilakukan fasilitator yaitu saat membahas format PS apakah Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Kemitraan. Seorang petani mengatakan:

Seperti itu sering rapat, di kantor desa, rumah-rumah, resort, ya murni dari masyarakat, kalau mau HKm atau kemitraan. Kalau memang tidak ada izin baru kita buat Kemitraan. Apa aspirasinya itu dari masyarakat" (Su/petani).

Bagi fasilitator sosialisasi merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan menyerap aspirasi yang dilakukan dengan diskusi. Tawar menawar kegiatan sering terjadi antara fasilitator dengan petani. Petani menginginkan program berdampak dan menguntungkan mereka. Kesepakatan terjadi setelah para pihak yang hadir menyetujui hasil walaupun hal tersebut dicapai dalam negosiasi yang tidak mudah. Misalnya dalam suatu pertemuan KPH menawarkan program Kemitraan, sedangkan petani lebih memilih HKm. Seperti yang diungkapkan penyuluh:

Kita sudah kasih perbandingan HKm akan begini, Kemitraan begini. Kalau saya mau pindah ke Kemitraan ketua kelompok bilang kalau Kemitraan kan nanti ada bantuan dari pemerintah seperti bibit produktif, batuan teknis penyuluhan dan sarana dan prasarana, belum pelatihan. Mereka bilang, saya tidak butuh itu bahkan saya yang akan ngasih bantuan ke pemerintah, ya susah kalau kayak gitu. (W/Penyuluh).

Musyawarah dalam memilih program seringkali berjalan tidak mudah. Hasil wawancara bisa saja memberi multitafsir dalam melihat fenomena di lapangan. Namun hal ini memperlihatkan tantangan dalam pendekatan ke masyarakat dalam memilih opsi yang dapat membawa pada kesepakatan-kesepakatan bersama. Program yang ditentukan berdasar dengan kesepakatan bersama memudahkan jalannya kegiatan. Diharapkan setelah memilih HKm, partisipasi masyarakat menjadi baik.

Menurut sudut pandang ketua kelompok tani sendiri mengapa memilih HKm dibanding Kemitraan yaitu dilihat dari tiga hal : *pertama* petani bebas menentukan tanaman, *kedua* tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan *ketiga* hak pengelolaan jelas. Informasi terkait HKm ini sebelumnya diperoleh lewat kelompok lain di sekitar desa yang telah melaksanakan program HKm. Ketua kelompok tani mengatakan:

Kalau Kemitraan itu dipegang Pemerintah, ada bagi hasil penggarap jadi bingung, baru masuk kok bayar, kalau bagi dua tidak bisa. Itu yang bikin bingung penggarap. Jadi dipertahankan HKm.... (S/Kelompok Tani)

KPH dan petani memiliki perbedaan pendapat dalam penentuan format manajemen di dalam kawasan. Persepsi kelompok tani terhadap Kemitraan antara lain: *pertama* petani membayar PNBP, *kedua* keterlibatan petani dalam kawasan dibatasi, *ketiga* pengelola dapat mengganti tanaman yang sudah ditanam petani, dan *keempat* ruang diskusi dalam pengelolaan hutan kecil. Dari alasan tersebut kelompok tani tidak dapat memproyeksikan keuntungan di masa yang akan datang ketika memilih Kemitraan.

Baik HKm maupun Kemitraan memiliki aturan pembayaran PNBP bagi pemegang izin. Namun, karena informasi yang tersebar tidak jelas, Petani merasa HKm tidak memiliki jenis-jenis iuran. Seperti yang dikatakan staf KPH:

Informasinya yang berkembang, HKm tidak mengambil hasil yang terlalu tinggi. Sementara kemitraan tinggi setorannya. Padahal mereka tidak tahu HKm dan kemitraan.... Keduanya ada PNBP-nya kan setelah berhasil tidak langsung cash. ... (E/Staf KPH).

Penyampaian informasi kepada petani menjadi tantangan dalam sosialisasi program PS. Masyarakat menjadi apatis pada program pemberdayaan bisa jadi karena informasi yang diperoleh tidak akurat. Dan sebaliknya, apabila sosialisasi berhasil, partisipasi masyarakat bisa jadi dapat meningkat. Salah satu upaya mengatasi hambatan dalam sosialisasi, seorang penyuluh mengatakan:

Kalau kita lagi sosialisasi kita koordinasi kepada kepala kelompok. Karena biasanya kan ada kesibukan anggota kelompok banyak di hutan. Kita mengikuti waktu mereka kapan luang. Oleh karena itu kita ambil hari jumat, nah jumat itu pun sebelum atau sesudah jumat. Kadang sebelum jumat kan tergesa gesa. (W/Penyuluh).

Penggunaan nilai-nilai lokal dalam proses pemberdayaan membantu dalam kelancaran program. Petani akan lebih menerima ketika fasilitator menggunakan nilai sosial budaya setempat ketika sosialisasi program. Dengan pendekatan kultural, diharapkan informasi yang disampaikan mudah dipahami dan diterima.

1.4.2. Partisipasi

Partisipasi petani dalam program masih perlu untuk ditingkatkan. Misalnya dalam struktur organisasi tingkat tapak, minat anggota dalam kepengurusan masih kurang. Ketua kelompok tani mengatakan:

Kalau di Gapoktan Saya sekretaris, Gapoktan Alam Lestari. Saya mengetuai 200 penggarap. Saya sebenarnya sudah tidak mau menjadi ketua tapi masih diberi kepercayaan sejak lama. (S/Kelompok Tani).

Regenerasi kepengurusan lembaga menjadi penting dalam menjamin kelangsungan kelompok tani dimasa yang akan datang agar program PS terus berkelanjutan. Diperlukan cara-cara yang tepat untuk menjaring minat warga berpartisipasi pada kelompok tani, sehingga kesenjangan jarak dengan

pengurus yang sekarang menjabat tidak terlalu jauh. Partisipasi juga tidak hanya soal kepengurusan pada kelompok tani, namun bermacam kegiatan dalam rangka menunjang tujuan kelompok. Misalnya dalam sosialisasi, kehadiran anggota menjadi perhatian tersendiri seperti yang dikatakan pegawai KPH:

Sosialisasi gampang di Desa X (nama disamarkan). Kalau Desa Y (nama disamarkan) mau ngumpul-ngumpul harus disiapkan uang transport, tapi kalau di Desa X Cuma kopi saja sudah biasa. Sosialisasi biasanya lewat kumpul-kumpul untuk penyuluhan. Kendala sosialisasi yang datang ketua-ketuanya saja. (H/Pegawai KPH).

Partisipasi masyarakat satu wilayah memiliki perbedaan dengan wilayah lain. Fasilitator tidak harus menyamakan kondisi setiap lokasi dengan satu pendekatan. Para pihak semestinya menerapkan pendekatan beragam ketika masuk pada wilayah yang berbeda. Pemetaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebelum program berjalan akan memudahkan fasilitator dalam menjalankan kegiatan. Sikap acuh masyarakat dalam program pembangunan bisa jadi karena para pihak banyak menjanjikan sesuatu namun ketika apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan, mereka merasa berat mengikuti kegiatan berikutnya. Sehingga untuk mengatasi hal ini, fasilitator menggunakan sumberdaya keuangan sebagai sumber insentif agar partisipasi masyarakat tetap ada. Namun disisi lain keterbatasan keuangan menjadi permasalahan dalam menjalankan program. Seperti yang dikatakan petugas KPH:

Masyarakat tergantung kita sebagai petugas. Kalau petugasnya baik mereka akan menerima. Ujung-ujungnya kita butuh asupan suplemen (keuangan) dan SDM, resort tidak punya dana, pengelolaan pemberdayaan masyarakat. (E/Pegawai KPH).

Perluasan jaringan misalnya menggandeng pihak-pihak yang belum bergabung untuk terlibat dalam kegiatan bersama sangat diperlukan. Para pihak yang selama ini banyak terlibat dalam pemberdayaan di kawasan Sesaot banyak berasal dari instansi bidang kehutanan. Diharapkan dengan melibatkan banyak stakeholder selain kehutanan akan mempermudah upaya penyelesaian masalah dengan beragam pendekatan.

1.4.3. Akuntabilitas

Fasilitator memainkan peran penting dalam program perhutanan sosial di Kawasan Sesaot. Mereka memiliki mekanisme akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan para pihak. Peran penting yang dimiliki dalam program mengharuskan mereka terus memperbaiki akuntabilitas. Penguatan aspek akuntabilitas lembaga fasilitator akan menguatkan output program pemberdayaan (Kilby, 2011). Stakeholders yang terdiri dari jaringan NGO, pemerintah, swasta, dan masyarakat menjaga hubungan dengan sesama mereka agar saling terbuka dalam memberikan informasi kepada pihak lain. Fasilitator menyiapkan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan banyak pihak. Staf LSM mengatakan :

Kalau di skema kegiatan kita namanya kick off meeting seperti sosialisasi, kita mau ngapain sih dalam jangka waktu tertentu, kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat instansi tertentu dinas LHK, termasuk pemerintah desa. Kalau kita akan bekerja durasi tertentu, manfaatnya seperti ini, penerima manfaat akan kita sampaikan. Kita ada strategi planning kaya renstra, renstra mengakomodir kepentingan nasional provinsi, nasional, dan global. (Sy/Staf LSM).

Perencanaan pengelolaan dalam tata kelola hutan merupakan ketentuan formal dan instrumen kontrol kegiatan. KPH memiliki Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) yang disusun berdasar masukan dari berbagai *stakeholder* terkait. Begitu juga dengan LSM yang melakukan evaluasi program agar kualitasnya dapat terjaga, dan sebagai pertanggungjawaban kepada para pihak. Staf LSM mengatakan:

Setiap kali kegiatan, nanti di tengah kegiatan kita akan buat pelaporan berkala mengenai perkembangan yang kita lakukan misalnya pelatihan sekian orang, kita sampaikan ke semua pihak, kita menggunakan pendekatan kolaboratif manajer. Jadi proyek ini bukan hanya kita saja

tapi milik semua pihak. Ini penting untuk pertanggung jawaban ke donor, jadi ada kepercayaan. (S /Staf LSM).

Informasi program merupakan kewajiban yang harus disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kegiatan ke para pihak. Dengan pelaporan yang baik diharapkan meminimalisir konflik yang sering terjadi dalam kegiatan pemberdayaan. Semakin baik informasi yang tersampaikan kepada lembaga donor akan semakin meningkatkan kepercayaan para donor pada kegiatan yang dilaksanakan.

1.4.4. Lembaga Lokal sebagai agen dalam pemberdayaan

Kelembagaan di sekitar kawasan hutan Sesaot terbagi menjadi dua yaitu informal dan formal. Kelembagaan informal berkaitan dengan kegiatan sosial dan budaya antara lain besiru, kelompok dzikir, pengajian, arisan, kesenian, olahraga, dan kepemudaan. Kelembagaan formal berkaitan dengan pemerintahan antara lain : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok wisata, kelompok perempuan, dan kelompok petani.

Kelompok tani merupakan lembaga formal karena berstruktur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu lembaga formal yaitu kelompok tani dapat dilihat pada Tabel 1. Kelompok tani memiliki peran salah satunya sebagai pintu masuk informasi dari para pihak ke petani. Anggotanya terdiri atas petani-petani yang berada pada satu kesatuan wilayah, dan mereka memiliki hak dan kewajiban sama. Petani memiliki hak berpendapat dalam rapat. Namun ketika yang disampaikan berseberangan dengan aturan, kelompok tani dapat menolak pendapat tersebut. Ketua kelompok tani mengatakan :

Semua apapun bentuk masukan untuk kelompok akan kita terima. Seperti untuk menanam jenis-jenis tanaman tertentu, kita sangat senang ada masukan. Akan tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan akan kita tolak. (S/Ketua kelompok tani).

Suara petani dapat membantu organisasi menjadi lebih baik jika apa yang disampaikan direspon secara tepat. Dalam sejarah pengelolaan hutan memperlihatkan bahwa masyarakat sekitar hutan tidak terbiasa dengan organisasi formal yang birokratis. Mereka mengelola sumber daya berdasar nilai-nilai lokal misalnya *besiru*, yaitu jenis kearifan lokal kegiatan gotong royong. *Besiru* yang dilakukan dalam kegiatan kehutanan misalnya membuat jalan di hutan, menata lahan garapan, menanam, dan lain sebagainya. Kegiatan ini mirip sistem arisan. Arisan biasanya menggunakan uang atau barang sebagai objeknya, sedang *besiru* menggunakan tenaga kerja. Pada perhutanan sosial, petani diwajibkan berorganisasi bersama kelompok tani. Untuk menutup kesenjangan ini, pemerintah merangkul banyak pihak misalnya LSM yang berpotensi dalam menjembatani kebutuhan lembaga tani yang bersifat formal dengan kondisi riil masyarakat sekitar hutan yang masih menggunakan kearifan mereka. Harapannya adalah petani dapat mengikuti kegiatan termasuk masyarakat rentan yang tidak masuk program PS. Strategi semacam itu memunculkan tokoh lokal yang menjadi kepercayaan para pihak atau fasilitator sebagai penghubung dengan masyarakat lokal.

Fasilitasi dari proses pemberdayaan bertujuan agar masyarakat dapat memiliki ide, inisiatif dan komitmen pada tujuan yang sudah ditentukan (Lemay-Hébert, 2012). Fasilitator mengharapkan kelompok tani mandiri dan terlepas campur tangan pihak lain, namun hal tersebut belum nampak. Staf KPH mengatakan:

beberapa waktu ini belum ada pertemuan, seharusnya mereka melakukan sendiri karena harapan kita mereka sudah mandiri, akan tetapi dalam kenyataannya mereka masih menunggu kita untuk mengadakan suatu kegiatan, padahal mereka sekarang sudah memiliki anggaran yang didapat dari iuran anggota". (E/ Pegawai KPH)

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut menjadi refleksi apakah substansi yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan mereka ataukah masih memerlukan input lain ke masyarakat. Keluhan fasilitator pada hasil wawancara mengindikasikan bahwa masyarakat masih membutuhkan pendampingan agar potensi inisiatif dari masyarakat dapat

diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri. Masih dominannya fasilitator tidak terlepas dari sejarah dimasa silam dalam pengelolaan hutan yang bersifat *top down*. Kebiasaan tersebut masih terasa hingga sekarang misalnya ketika ada pembangunan fisik fasilitas pariwisata masih mengandalkan fasilitator. Perubahan dari suasana informal ke formal atau dari yang sebelumnya besiru menjadi kelompok tani menjadi salah satu transformasi kelembagaan di desa. Namun perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan sikap masyarakat ketika menjalankan organisasi formal secara cepat.

Tabel 1. Kelompok Pengelola HKm di Kawasan Sesaot, Narmada

Nama Kelompok	Luas Garapan (Ha)	Jumlah Anggota (KK)
KMPH Lebah Suren	236 116	116
Wana Abadi	100	104
Wana Lestari	215	218
Wana Dharma	130	675
Gapoktan Pakuan Abadi	118	114
KTH Patuh Angen	26	25
KTH Mandiri Bersama	25	30
KTH Bao Daye	114	87
KMPL Selen Aik	115	97
KTH Sedayu Indah	30	25
Gapoktan Alam Lestari	830,98	1279

Sumber : KPH Rinjani Barat (2019)

1.5. Hasil Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui PS adalah untuk peningkatan *skill* dan aset dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari sehingga berpengaruh pada kondisi sosial-ekonomi petani. Peningkatan itu misal petani mampu menyeleksi tanaman dengan baik sehingga hasilnya mengalami peningkatan, seperti yang diungkapkan Bapak Sup :

Kalau sekarang tanamannya lebih bagus karena yang ditanam dipilih-pilih, seperti benih Bangkok. Petani sekarang lebih milih jenis yang baik....Tapi sekarang ada nilai ekonomi komersilkan, dulu tidak, sekarang komoditinya lebih bagus..". (Su/Petani).

Berdasar wawancara mengindikasikan bahwa informan merasakan ada perbaikan kondisi hasil dari tanaman di hutan. Sejak beberapa tahun ini para pihak mengenalkan kopi sambung, durian sambung, dan tanaman berkualitas lainnya yang diyakini produksi buahnya bagus. Biasanya setelah ada petani berhasil mengusahakan jenis komoditas tertentu, kemudian petani yang lain belajar kepada petani yang menjadi *role model* tersebut. Keberhasilan dalam pembelajaran pengusaha komoditas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat di pedesaan lebih banyak dipengaruhi jaringan di desa yang menjadi panutan apakah itu individu atau kelompok. Itulah pentingnya bagaimana memunculkan kader atau panutan lokal atau *local champion* yang dapat diterima masyarakat sekitar agar apa yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang diungkapkan staf LSM :

Itu yang kita lakukan termasuk memfasilitasi peningkatan kapasitas ibu-ibu, misalnya pengolahan produk kita latih sehingga ada beberapa anggota kelompok yang kemudian menjadi mentor bagi yang lain, kemudian membantu kita di lapangan untuk menjelaskan ke pihak yang lebih luas.... (Sy/Staf LSM).

Dari hasil wawancara menegaskan tentang pentingnya memunculkan tokoh-tokoh lokal yang akan dijadikan kader fasilitator lokal atau *local champion*. Penciptaan kader ini bertujuan agar ketika program selesai masih ada beberapa penduduk yang menggantikan peran fasilitator dari lembaga

formal. Keberlanjutan program sangat penting agar sumber daya yang digunakan selama ini dapat terus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat terutama untuk dimasa yang akan datang.

Aset yang berupa tanaman MPTS memiliki nilai yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Misalnya, tanaman durian pada masa awal penanaman memiliki nilai ekonomi kecil, namun ketika sudah tumbuh besar dan berbuah rutin nilainya akan semakin meningkat. Investasi tanaman MPTS seperti durian menjadi populer terutama beberapa pihak mengenalkan jenis durian dengan buah besar, tidak tergantung musim, dan rasa yang unik. Kondisi ini mendorong petani menanam durian di lahan mereka lebih banyak lagi. Bersamaan dengan tanaman durian, petani juga banyak mengusahakan tanaman seperti alpukat, empon-empon, umbi-umbian, pisang, aren, dan lain sebagainya. Tanaman yang ditanam untuk memenuhi kebutuhan harian, bulanan, dan tahunan.

Hasil tanaman di hutan dapat dinikmati petani dan keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perubahan terjadi di desa setelah petani berhasil mengusahakan HKm karena hasilnya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pernyataan Bapak Sup:

Sekarang ini banyak yang sukses terutama di Rumbuk, karena garapan, Dia bangun rumah Dia ekonominya tinggi itu karena HKm nya bagus. Karena Dia terlalu dekat dengan lahan dan kebanyakan tidak punya kebun, sehingga intens di hutan... Ya dari aren kopi sambung ya durian. Kalau Dia satu arah Rumbuk, tapi Kita ada sawah sehingga tidak fokus..."(Su/Petani).

Pengusahaan berbagai komoditas di HKm dilakukan dengan cara agroforestry. Petani mengusahakan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di sela tanaman kayu. Pengusahaan dengan cara agroforestry memaksimalkan potensi penggunaan lahan untuk mencukupi pendapatan keluarga petani. Penggarap yang lokasinya jauh dari hutan biasanya memiliki pekerjaan lain misalnya petani sawah, sehingga mereka tidak fokus memanfaatkan program HKm. Inilah yang menyebabkan perbedaan antara petani yang dekat dengan hutan yang biasanya intens mengerjakan di hutan sebagai pekerjaan pokok dengan petani yang agak jauh dari hutan yang menggarap hutan untuk tambahan pendapatan.

Namun program PS juga mengisahkan kepiluan pada sebagian warga. Tidak semua masyarakat sekitar hutan mendapat akses HKm karena keterbatasan sumberdaya hutan yang tersedia untuk dibagi secara merata dengan penduduk yang lain. Pada awal pembagian lahan garapan, penggarap mendapatkan lahan sesuai kesepakatan dalam kelompok. Seiring berjalannya waktu, interaksi antar warga membuat hubungan-hubungan transaksi sosial ekonomi berjalan secara alami. Tanah merupakan aset yang dapat digunakan dalam mencukupi kebutuhan hidup, termasuk jika sedang terdesak dalam permasalahan keuangan dengan cara menawarkan lahan garapannya kepada orang lain untuk diganti dengan sejumlah uang. Jika hal ini terus berlangsung maka hanya orang tertentu saja yang memiliki lahan yang luas. Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil petani yang terus mengecil pada satu sisi dan disisi lain ada petani yang hasil hutannya semakin membesar. Program perhutanan sosial secara rata-rata berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat akan tetapi disisi lain program ini juga menyebabkan kesenjangan di pedesaan. Seorang petani Bapak Sup mengungkapkan tentang penyebab perbedaan kepemilikan lahan garapan pada HKm sebagai berikut:

Setiap orang beda lahan garapan, waktu L U dikasih lahan, kemudian ada yang dipindahtangankan, itu kan tidak rata dulu katanya diratakan, tapi karena ada yang berpindah transmigrasi sehingga luasnya berbeda beda. Ada yang sampai punya 2 hektar ada yang 12 are. Paling paling rendah disini 7 are, tapi dirumbuk itu 1 hektar ke atas. (Su/Petani).

Dari wawancara dengan Bp Sup memperlihatkan bahwa ketika awal pembagian lahan penggarap mendapat jatah tanah garapan dengan luasan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, luasan kepemilikan lahan garapan berubah dari awal pembagian. Penyebabnya seperti perubahan struktur sosial ekonomi seperti kasus kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, jual beli, dan lain sebagainya yang berubah setiap waktu. Pengawasan dari kelompok tani masih minim dalam mengontrol pindah tangan lahan garapan. Kontrol kelompok tani diperlukan agar dikemudian hari penguasaan lahan garapan HKm tidak menyebabkan kesenjangan di dalam kawasan HKm.

4. Pembahasan

1.6. Perbaikan proses pemberdayaan

Empat elemen pemberdayaan sebagaimana pendapat Narayan (2002) yaitu informasi, akuntabilitas, kelembagaan lokal, dan partisipasi membantu analisis studi ini. Keempatnya saling berkaitan, misalnya partisipasi petani dipengaruhi informasi yang disampaikan dan diterima secara tepat, akuntabilitas lembaga yang baik, dan organisasi lokal yang mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan.

Pada proses pemberdayaan di Sesaot, petani memperoleh informasi PS lewat sosialisasi dari lembaga terkait yang menjadi fasilitator. Pada saat sosialisasi, fasilitator juga berupaya agar memperoleh informasi masukan berupa keinginan dan harapan petani pada PS. Informasi ini penting dalam menentukan kegiatan selanjutnya. Misinformasi antara masyarakat dan lembaga fasilitator menyebabkan hambatan yang tidak dapat dihindari. Misalnya ketika petani harus memilih jenis PS apakah HKm atau Kemitraan. Pada saat itu terjadi jalan buntu di antara kedua belah pihak yang saling mempertahankan pendapatnya. Petani menganggap kemitraan memiliki beban iuran lebih besar dibanding HKm, dan tidak bebas menentukan tanaman. Namun berdasar aturan keduanya memiliki iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar pemegang izin lahan garapan. Fakta ini menunjukkan sosialisasi tidak efektif karena menimbulkan kecurigaan petani. Menurut penelitian Waddington et al. (2014) menemukan bahwa tidak efektifnya sosialisasi ke petani karena: penyampaian materi secara *top-down*, menggunakan pendekatan alih teknologi, substansi tidak sesuai atau relevan dengan konteks lokal, ketidakseimbangan dalam hubungan petani dan fasilitator, dan fasilitator menggunakan bahasa asing (bukan lokal). Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi lokal juga sering terjadi dalam pengelolaan kehutanan seperti penelitian Suharjito & Wulandari (2019). Perencanaan yang memperhatikan kondisi lokal membantu program PS berjalan baik. Hal ini karena penduduk lokal akan lebih mudah memahami materi ketika isinya sesuai dengan pengetahuan dan kebutuhan mereka.

Saluran komunikasi sekarang ini memudahkan petani dalam memperoleh informasi tentang kehutanan misalnya lewat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi ini meningkatkan literasi dan kemandirian petani dalam PS. Namun, latar belakang penggarap/petani beragam dari pendidikan, ekonomi, dan usia. Sebagian besar penggarap berada pada kondisi sosial ekonomi rentan. Keadaan seperti ini mengurangi kepekaan mereka terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Mittal & Mehar (2016) melalui penelitiannya menyatakan bahwa akses informasi petani dipengaruhi karakteristik sosial petani seperti umur, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Biasanya di Sesaot penyampaian informasi melalui pertemuan yang melibatkan penggarap dalam sebuah forum di kelompok-kelompok tani. Mungkin kedepan perlu strategi baru dengan tujuan agar petani lebih mudah mendapat informasi penting tentang perhutanan sosial.

Para pihak mengajak masyarakat untuk aktif dalam PS. Lembaga dapat menggerakkan partisipasi dengan insentif (Chapman et al., 2019; Luo et al., 2014; Liu et al., 2018). Insentif yang sudah dilakukan di kawasan Sesaot antara lain berupa izin tanam, bantuan bibit, modal usaha, pelatihan, dan bantuan alat. Pemberian ini membantu kelancaran program, misalnya reboisasi yang dilakukan beriringan dengan izin penanaman MPTS dan tumpang sari pada era 80 an di kawasan Sesaot memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dibanding dengan kegiatan yang tidak ada insentif. Para pihak juga dapat mengembangkan partisipasi dengan membuat aturan yang mendukung petani misalnya pengaturan harga yang sesuai (Zakaria, 2010). Namun Berglund et al. (2013) berpendapat lain dengan melihat bahwa partisipasi yang dipengaruhi oleh insentif tidak melatih belajar petani dan keberlanjutannya dipertanyakan. Hal senada juga diungkap Sahide et al. (2020) melihat bahwa partisipasi yang dilakukan dalam suasana formal seperti pemberian insentif membuat ketidakpedulian petani dan lambat laun mengancam perencanaan hutan menjadi turun kualitasnya. Dari sini fasilitator harus lebih cermat dalam melihat kondisi masyarakat agar cara-cara pendekatan terhadap masyarakat memperoleh hasil baik. Fasilitator dapat memadukan pendekatan formal dengan non formal dalam memunculkan partisipasi. Perpaduan ini saling melengkapi satu sama lain. Misalnya masyarakat lokal

memiliki cara gotong royong yang dikenal dengan *besiru* yang efektif dalam menjaga partisipasi masyarakat dalam aktivitas kehutanan. Nilai lokal *besiru* bisa dimasukan kedalam kelembagaan kelompok tani yang bersifat formal.

Kepercayaan masyarakat pada program dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam program PS. Fasilitator melaporkan kegiatan sebagai bentuk penggunaan sumber daya yang dilakukan secara akuntabel. Pertanggungjawaban dapat berupa respon positif fasilitator kepada para pihak yang meminta informasi pelaksanaan program. Misalnya laporan rutin kegiatan LSM kepada donor. Kepercayaan masyarakat harus dijaga karena menurut Mbeche & Dorward (2014) apabila tingkat kepercayaan petani turun menyebabkan mereka tidak berimprovisasi di lahan garapan sehingga terkesan program dibiarkan. KPH memberi informasi kegiatannya lewat media sosial, dan website Dinas Kehutanan NTB. Namun informasi luaran kegiatan kurang informatif karena dilakukan tidak rinci per item kegiatan. Laporan lebih banyak diketahui kalangan tertentu, sedangkan masyarakat secara umum belum peduli dengan proses akuntabilitas suatu program.

Kapasitas organisasi lokal merupakan perpaduan dari kemampuan menggerakkan anggota untuk bekerja sama, mengatur diri mereka sendiri, dan memobilisasi sumber daya dalam pemecahan masalah bersama (Narayan, 2002). Namun peran lembaga kelompok tani lebih banyak di bingkai dalam kegiatan formal. Kebiasaan semacam ini akan semakin menguatkan peran pemerintah dan melemahkan peran masyarakat lokal (Fisher & Muur, 2020). Kebiasaan lama di pedesaan yang biasa dengan gotong royong lambat laun terganti dengan kegiatan bersifat keproyekan. Pergantian suasana ini turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan. Hanya sedikit anggota petani yang memahami tentang lembaga kelompok tani dalam arti formal. Posisi elit desa dalam bidang perhutanan sosial yang sebelumnya sudah memiliki posisi sosial ekonomi baik menjadi lebih kokoh. Formalisasi hak pengelolaan dan pemanfaatan menjadikan perhutanan sosial lebih birokratis (Erbaugh, 2019). Persyaratan berbagai kegiatan sebelum dan setelah perhutanan sosial terdiri dari aturan yang tertuang dalam berbagai tingkatan mulai dari nasional hingga peraturan kelompok tani. Hal ini juga sama dengan penelitian Purnomo et al. (2022) melihat bahwa kelompok tani pada program perhutanan sosial merupakan organisasi formal dimana keputusan dominan dipegang elit, dan petani secara umum kurang merasakan manfaat dari organisasi tersebut.

1.7. Mempertanyakan hasil pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari perubahan sebelum dan setelah program berjalan. Pemberdayaan menekankan pada proses menaikkan taraf hidup masyarakat rentan (Agarwal, 2020). Pemberdayaan berhasil adalah ketika tujuan yang tercantum dalam perencanaan dapat terwujud (Uphoff, 2005). Menurut Narayan (2002) keberhasilan pemberdayaan dilihat dari ukuran asset dan kemampuan individu untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol, dan meminta pertanggungjawaban lembaga (Narayan, 2002). Peningkatan aset dapat mendekatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kemampuan sosial lainnya (Narayan, 2002).

Wawancara dengan petani memperlihatkan ada peningkatan usaha pertanian berbentuk aset dan keterampilan individu dalam pengusahaan komoditas tertentu. Petani selektif dalam memilih tanaman apa yang akan diusahakan. Sikap ini berkaitan dengan keuntungan yang sudah diproyeksikan petani. Hal ini juga sama dengan penelitian Lee et al. (2017) memperlihatkan bahwa PS meningkatkan kemampuan petani dalam penyiapan lahan dan pemilihan tanaman unggul. Pada saat ini penanaman jenis HHBK dan MPTS memiliki prospek bagus dalam peningkatan ekonomi petani. Namun di lokasi penelitian tidak semua petani mendapat hasil yang sama. Petani memperoleh hasil berbeda karena intervensi dalam pengelolaan lahan beragam. Menurut Dinas LHK NTB dalam Suradireja et al (2018), keberhasilan PS di NTB tidak merata pada tiap petani tergantung pada: 1) Kondisi lahan, 2) waktu pengerjaan lahan, 3) kemampuan petani, dan 4) intervensi pihak lain. Para pihak perlu memperhatikan dampak program PS pada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di desa dikemudian hari agar tidak semakin besar dan keadilan program semakin diperhatikan. Selain itu para pihak perlu menggali kearifan lokal untuk mendukung program, karena penguatan modal sosial dapat membantu program kehutanan berjalan baik (Rakatama & Pandit, 2020; Lee et al., 2017; Roslinda et al., 2017).

Program PS yang telah berjalan memiliki dua dimensi. Pada satu sisi perhutanan sosial telah berhasil mendistribusikan tanah negara kepada masyarakat sekitar hutan secara sah. Hal ini dimanfaatkan masyarakat sebagai kesempatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun pada sisi yang lain ada sebagian masyarakat yang belum siap dalam menjalankan sistem baru yaitu perhutanan sosial yang lebih terstruktur dan birokratis. Ada sebagian masyarakat yang masih memerlukan perhatian karena mereka tersisih untuk dapat mengembangkan diri. Perhatian yang lebih besar seharusnya diberikan kepada masyarakat yang masih rentan tersebut agar mampu meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi lebih baik.

5. Kesimpulan

Studi ini ingin menunjukkan bagaimana proses pemberdayaan sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan program PS. Analisa menggunakan teori pemberdayaan yang menjelaskan mengenai dukungan pemberdayaan berupa informasi, akuntabilitas, partisipasi, dan dukungan lembaga lokal begitu penting untuk diterapkan. Ketika proses pemberdayaan sesuai target yang ditentukan diharapkan program pemberdayaan berjalan baik. Namun ketika proses tersebut bermasalah, bisa jadi keberhasilan programnya kecil. Idealnya program perhutanan sosial ingin memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan pengusaha berbagai komoditas kehutanan. Hasilnya untuk memajukan kondisi sosial ekonomi dan peningkatan aset sekaligus kapasitas petani. Kenyataannya program menghasilkan luaran yang beragam. Intervensi yang dilakukan tanpa memahami konteks lokal akan semakin membuat kondisi tidak seimbang. Yaitu dimana ada masyarakat yang terus meningkat perekonomiannya dengan apa yang diusahakan, namun ada sekelompok masyarakat yang kurang beruntung karena ada keterbatasan pada akses dan kemampuan mengolah sumber daya yang ada.

Proses dalam program PS memiliki karakter yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Program terkesan kaku ketika kurang improvisasi dan menyamakan cara-cara yang digunakan untuk semua lokasi. Para pihak perlu mengekspresikan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan kondisi setempat, namun tidak boleh melupakan dasar-dasar pelaksanaan program seperti akuntabilitas agar kepercayaan masyarakat terbangun, begitu juga dengan informasi, partisipasi, dan peran lembaga lokal. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu lama dan dibutuhkan kerja keras dari para pihak bukan kerja periode keproyekan.

6. Saran

Keberhasilan pemberdayaan dilihat dari penambahan aset yang menunjukkan perbaikan kuantitas dan kualitas yang diperoleh dari kawasan hutan. Namun hal ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir pada petani secara umum, karena masih ada diantara mereka yang belum berhasil. Untuk kedepannya diperlukan evaluasi terhadap program yang berjalan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Fasilitator dapat menguatkan posisi sebagian petani yang belum tersentuh secara baik dan belum menunjukkan perkembangan pengusahaannya. Perlakuan bertujuan agar PS berhasil secara bersama-sama dan mencegah terjadinya kesenjangan masyarakat di sekitar hutan.

Daftar Pustaka

- Agarwal, B. (2020). Does group farming empower rural women? Lessons from India's experiments. *The Journal of Peasant Studies*, 47(4), 841–872. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1628020>
- Andersson, K. P., Gibson, C. C., & Lehoucq, F. (2004). The Politics of Decentralized Natural Resource Governance. *PS: Political Science & Politics*, 37(3), 421–426. <https://doi.org/10.1017/S1049096504004597>
- Berglund, B., Hallgren, L., & Aradóttir, Á. L. (2013). Cultivating Communication: Participatory Approaches in Land Restoration in Iceland. *Ecology and Society*, 18(2), art35. <https://doi.org/10.5751/ES-05516-180235>
- Chapman, M., Satterfield, T., & Chan, K. M. A. (2019). When value conflicts are barriers: Can relational values help explain farmer participation in conservation incentive programs? *Land Use Policy*, 82, 464–475. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.11.017>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

- SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=s4ViswEACAAJ>
- de Jong, W. (2012). Discourses of community forestry. *Forest-People Interfaces*, 107–120. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-749-3_6
- Djambhuri, T. L. (2008). Community participation in a social forestry program in Central Java, Indonesia: the effect of incentive structure and social capital. *Agroforestry Systems*, 74(1), 83–96. <https://doi.org/10.1007/s10457-008-9150-5>
- DLHK NTB. (2021). *No Title*. Tingkatkan Sinergitas Untuk Pemberdayaan Kemitraan Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan. <https://dislkh.ntbprov.go.id/2021/06/15/tingkatkan-sinergitas-untuk-pemberdayaan-kemitraan-perhutanan-sosial-dan-kemitraan-lingkungan/>
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109, 102019. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>
- Fisher, M.R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Fisher, Micah R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economies, and ecologies of Indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Fisher, Micah R., & van der Muur, W. (2020). Misleading Icons of Communal Lands in Indonesia: Implications of Adat Forest Recognition From a Model Site in Kajang, Sulawesi. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 55–76. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670244>
- Galudra, G. (2019). Focusing on facilitation: Issues and challenges of capacity development in Indonesia's social forestry reforms. *Forest and Society*, 3(1), 133. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5995>
- Kilby, P. (2011). *NGOs in India : the challenges of women's empowerment and accountability*. Routledge.
- KPH_Rinbar. (2019). *Makalah Perkembangan (IUPHKm) Batu Mekar "Gapoktan Alam Lestari*. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat.
- Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest management. *Forest Science and Technology*, 13(3), 133–141. <https://doi.org/10.1080/21580103.2017.1355335>
- Lemay-Hébert, N. (2012). Coerced transitions in Timor-Leste and Kosovo: managing competing objectives of institution-building and local empowerment. *Democratization*, 19(3), 465–485. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.674358>
- Liu, M., Yang, L., Bai, Y., & Min, Q. (2018). The impacts of farmers' livelihood endowments on their participation in eco-compensation policies: Globally important agricultural heritage systems case studies from China. *Land Use Policy*, 77, 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.054>
- Luo, L., Wang, Y., & Qin, L. (2014). Incentives for promoting agricultural clean production technologies in China. *Journal of Cleaner Production*, 74, 54–61. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.03.045>
- Mbeche, R. M., & Dorward, P. (2014). Privatisation, empowerment and accountability: What are the policy implications for establishing effective farmer organisations? *Land Use Policy*, 36, 285–295. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.014>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Mittal, S., & Mehar, M. (2016). Socio-economic Factors Affecting Adoption of Modern Information and Communication Technology by Farmers in India: Analysis Using Multivariate Probit Model. *The Journal of Agricultural Education and Extension*, 22(2), 199–212. <https://doi.org/10.1080/1389224X.2014.997255>
- MoEF. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- MoEF. (2021). *Capaian TORA Dan Perhutanan Sosial Di Tahun 2021*. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-di-tahun-2021>
- Moeliono, M., Thuy, P. T., Waty Bong, I., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom? A comparison of policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction : A Sourcebook*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15239>
- Peraturan Menteri Kehutanan No 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm). (n.d.).
- Peraturan Menteri Kehutanan No 39 Tahun 2013 tentang Program Kemitraan Kehutanan. (n.d.).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa. (n.d.).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan*

Sosial.

- PP No. 6 Tahun 2007. (2007). *Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*.
- Purnomo, M., Hadiwiyono, E., Andriatmoko, N. D., Pariasa, I. I., Kustanti, A., & Faust, H. (2022). Transformation Role of Forest Farmer Group's (FFGs) in Indonesia from Development Agent to Brokering Project. *SAGE Open*, 12(1), 215824402210821. <https://doi.org/10.1177/21582440221082144>
- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- ROSLINDA, E., EKYASTUTI, W., & KARTIKAWATI, S. M. (2017). Social capital of community forest management on Nusapati Village, Mempawah District, West Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 18(2), 548–554. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180215>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Suhajito, D., & Wulandari, C. (2019). A reflection of Social Forestry in 2019: Towards inclusive and collaborative government approaches. *Forest and Society*, 3(1), 137. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6099>
- Suradireja, D. Y., Pramaria, A., Markum, Santoso, W. J., & Hakim, M. R. (2018). *Menoleh Jalan Panjang Hutan Kemasyarakatan. Catatan Perjalanan Tiga Dasawarsa Program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok*. CV Bee Media Publisher.
- Uphoff, N. (2005). Analytical Issues in Measuring Empowerment at the Community and Local Levels. In D. Narayan (Ed.), *Measuring Empowerment : Cross Disciplinary Perspectives*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7441>
- Waddington, H., Snilstveit, B., Hombrados, J., Vojtkova, M., Phillips, D., Davies, P., & White, H. (2014). Farmer Field Schools for Improving Farming Practices and Farmer Outcomes: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 10(1). <https://doi.org/10.4073/CSR.2014.6>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Zakaria, A. K. (2010). Program Pengembangan Agribisnis Kedelai Dalam Peningkatan Produksi dan Pendapatan Petani. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 29(4). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21082/jp3.v29n4.2010.p147-153>



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).